



Dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi

**RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA
2018-2020**

OPEN GOVERNMENT INDONESIA
TRIWULAN B03, B06, B09, DAN B12 TAHUN
2020



**DAFTAR HALAMAN CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RAN OGI TAHUN 2020
BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN RAN OGI 2018 – 2020**

	Halaman
Kementerian Sosial.....	2
Kementerian Keuangan.....	4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	6
Kementerian Dalam Negeri	12
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16
Komisi Pemilihan Umum.....	18
Kementerian Kesehatan.....	19
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	22
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	29
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	31
Komisi Informasi Pusat.....	34
Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM.....	38

**CAPAIAN TARGET TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN SOSIAL (KEMENSOS)**

Nomor Komitmen : 2
 Aksi : Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan
 Penanggung Jawab : Kementerian Sosial
 Instansi Terkait : 1. Kementerian Dalam Negeri
 2. Kementerian Kesehatan
 3. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 CSO Mitra : Media Link (Perkumpulan Media Lintas Komunitas)

Keterangan:

 Target tercapai

 Target tidak tercapai

 Target belum dikumpulkan

 Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	UK1: Penyempurnaan roadmap yang meliputi: kerangka regulasi, sosialisasi roadmap OGI, dan alat ukur keterbukaan pemerintah	UK1	B03	Penyesuaian dan penyempurnaan roadmap OGI		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	Konsultasi publik dalam penyusunan Roadmap OGI		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Finalisasi Roadmap OGI		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B12	Tidak ada target		
		UK2: Implementasi rencana kerja tim	UK2	B03	Tidak ada target		

		koordinasi OGI yang meliputi: pertemuan dewan pengarah dan pertemuan lembaga donor		B06	Pertemuan tim koordinasi OGI		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Tidak ada target		
				B12	Pertemuan tim koordinasi OGI	<p>1. Nota Dinas No. 333/Dt.7.2.ND/12/2020 mengenai Data Dukung Capaian Target B12 Tahun 2020 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia 2018-2020 08 December 2020</p> <p>2. Lampiran Nota Dinas laporan capaian RAN OGI 18-20 komitmen xv dan xvi1</p>	

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU)**

Nomor Komitmen : 3
 Aksi : Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah
 Penanggung Jawab : Kementerian Keuangan
 Instansi Terkait : 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kementerian Kesehatan
 3. Kementerian Sosial
 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 5. Kantor Staf Presiden
 6. Komisi Informasi Pusat
 CSO Mitra : Sekretariat Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga	Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN	B03	Terselenggaranya FGD terkait strategi manajemen data APBN di Portal Data APBN	1. Nota Dinas Nomor Nd-426/AG.26/2020 mangerai FGD Manajemen data terrait penyediaan dan publiais data Kepala Kepala Subdit. Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, II, dan III 2. Daftar Hadir Zoom FGD Penyediaan Data	Data dukung sesuai dengan target capaian

			B06	Tersedianya publikasi data anggaran pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan melalui Belanja K/L dan TKDD dalam format data spasial di Portal Data APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Screenshot Portal Data APBN Kemenkeu mengenai Anggaran Pendidikan 2. Screenshot Portal Data APBN Kemenkeu mengenai Anggaran Kesehatan 	Data dukung sesuai dengan target capaian
2	Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah		B09	Tersedianya data program perlindungan sosial dalam format data spasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Screenshot Peta Data APBN 2. Screenshot Data APBN 	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial dalam format data terbuka (open data)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis pemenuhan data dan publikasi data pada portal data apbn kementerian keuangan. 2. Screenshot Anggaran Pendidikan yang dapat diakses di Portal APBN Kementerian Keuangan. 	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (KEMENDIKBUD)**

Nomor Komitmen : 4
 Aksi : Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif
 Penanggung Jawab : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Instansi Terkait : 1. Ombudsman Republik Indonesia
 2. Pemerintah Daerah
 CSO Mitra : Transparency International Indonesia (TII)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target			Realisasi	Catatan
						(Data Dukung)	
1	Tersedianya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	UK1: Pelaksanaan sosialisasi halaman NPD kepada masyarakat dan pemda	UK1	B03	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 2 provinsi.		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
					Penyusunan analisis tren kinerja pendidikan berdasarkan NPD 2016 - 2019 dan pemanfaatan NPD di beberapa daerah dengan melibatkan CSO terkait		
				B06	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 2 provinsi.		

						<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94425/A1/PR/2020 2. Daftar Hadir Pemanfaatan Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Pendidikan 3. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94426/A1/PR/2020 4. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94433/A1/PR/2020 5. Presentasi NPD dan Manfaatnya bagi Perencanaan Pendidikan, Selasa 13 Oktober 2020 6. Presentasi Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Perencanaan Pendidikan 7. Presentasi Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Program PAUD Dikdas dan Dikmen 8. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94424/A1/PR/2020 untuk Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94423/A1/PR/2020 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	
			B09	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 6 provinsi.			Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Sosialisasi NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah pada 5 provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94425/A1/PR/2020 		Data dukung sesuai dengan target capaian

						<p>Bappeda Province dan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Daftar hadir pemanfaatan neracara pendidikan daerah untuk perencanaan pendidikan 3. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94426/A1/PR/2020 untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kab/Kota 4. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94433/A1/PR/2020 5. Presentasi berjudul NPD dan Manfaatnya bagi Perencanaan Pendidikan, 13 Oktober 2020 6. Presentasi berjudul Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Perencanaan Pendidikan 13 Oktober 2020 7. Presentasi berjudul Peran NPD dalam Program PAUD Dikdas dan Dikmen 8. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94424/A1/PR/2020 untuk Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94423/A1/PR/2020 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	
--	--	--	--	--	--	--	--

		UK2: Terselenggaranya kegiatan/forum diskusi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat	UK2	B03	Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 2 provinsi		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
	B06			Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 2 provinsi		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung	
	B09			Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 2 provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94425/A1/PR/2020 untuk Bappeda Province dan Kabupaten/Kota 2. Daftar Hadir Pemanfaatan Neracara Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Pendidikan 3. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94426/A1/PR/2020 untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota 4. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94433/A1/PR/2020 5. Presentasi berjudul NPD dan Manfaatnya bagi Perencanaan Pendidikan 6. Presentasi berjudul Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Perencanaan Pendidikan 13 Oktober 2020 7. Presentasi berjudul Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Program PAUD Dikdas dan Dikmen, 13 Oktober 2020 	Data dukung sesuai dengan target capaian	

					<p>8. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94424/A1/PR/2020 untuk Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>9. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94423/A1/PR/2020 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	
			B12	Diskusi perencanaan anggaran pendidikan daerah dengan masyarakat pada 5 provinsi	<p>1. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94425/A1/PR/2020 untuk Bappeda Province dan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Daftar Hadir Pemanfaatan Neracara Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Pendidikan</p> <p>3. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94426/A1/PR/2020 untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota</p> <p>4. Undangan Diskusi Neraca Pendidikan Daerah Nomor 94433/A1/PR/2020</p> <p>5. Presentasi berjudul NPD dan Manfaatnya bagi Perencanaan Pendidikan</p> <p>6. Presentasi berjudul Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Perencanaan Pendidikan 13 Oktober 2020</p>	Data dukung sesuai dengan target capaian

						<p>7. Presentasi berjudul Peran Neraca Pendidikan Daerah dalam Program PAUD Dikdas dan Dikmen, 13 Oktober 2020</p> <p>8. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94424/A1/PR/2020 untuk Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>9. Surat Sosialisasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Nomor 94423/A1/PR/2020 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI)**

Nomor Komitmen : 3
 Aksi : Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah
 Penanggung Jawab : Kementerian Dalam Negeri
 Instansi Terkait : 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kementerian Kesehatan
 3. Kementerian Sosial
 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 5. Kantor Staf Presiden
 6. Komisi Informasi Pusat
 CSO Mitra : Sekretariat Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga	Terlaksananya implementasi E-Budgeting di 34 Provinsi	B03	Surat Edaran kepada Pemda tentang Pemanfaatan SIPD	SE Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B06	Pelaksanaan ToT (Training of Trainer) Pengelolaan SIPD kepada Pemda Provinsi	1. Rapat Pendampingan penerapan sistem E-Budgeting dalam Penyusunan APBD 28-30 November 2019 2. Laporan Perkembangan SIPD mengenai Kesiapan SIPD sebagai diskripsi pendukung	Data dukung sesuai dengan target capaian

					Surat Edaran 903/5746/SJ tanggal 26 Juni 2020	
2	Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah		B09	Pelaksanaan ToT (Training of Trainer) Pengelolaan SIPD kepada Pemda Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pendampingan Penerapan Sistem E-Budgeting Dalam Penyusunan Apbd 28-30 November 2019 2. Rapat Pendampingan Penerapan Sistem E-Budgeting Dalam Penyusunan Apbd 25-27 November 2019 3. Radiogram ToT tanggal 25-27 November 2019 	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Implementasi SIPD	Screenshot SIPD	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI)**

Nomor Komitmen : 5
 Aksi : Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa
 Penanggung Jawab : Kementerian Dalam Negeri
 Instansi Terkait : 1. Kantor Staf Presiden
 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 CSO Mitra : 1. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
 2. Wahana Visi Indonesia (WVI)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa	Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	B03	Penyusunan draft 1 Juknis musyawarah desa		Target tidak dilanjutkan
			B06	Konsultasi publik dan FGD juknis musyawarah desa		Target tidak dilanjutkan
2	Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif		B09	Penyempurnaan Juknis dan FGD musyawarah desa		Target tidak dilanjutkan
			B12	Finalisasi dan launching juknis dan FGD musyawarah desa		Target tidak dilanjutkan

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI)**

Nomor Komitmen : 6
 Aksi : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati
 Penanggung Jawab : Kementerian Dalam Negeri
 Instansi Terkait : Komisi Informasi Pusat
 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Informasi dan Komunikasi Publik)
 CSO Mitra : 1. Indonesia Parliamentary Center (IPC)
 2. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Tersedianya platform E-Legislati dalam website DPRD di 5 kabupaten/kota.	B03	Pembangunan platform e-legislasi di 5 kabupaten/kota	Rekap platform e-legislasi di 5 Kab/Kota B-06 2020	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B06	Pembangunan platform e-legislasi di 5 kabupaten/kota	Rekap platform e-legislasi di 5 Kab/Kota B-06 2020	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B09	<i>Pembangunan platform e-legislasi di 5 kabupaten/kota</i>	1. Portal e-Legislati pada 5 (lima) website DPRD 2. Screenshot portal legislasi	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Tersedianya platform E-Legislati dalam website DPRD di 5 kabupaten/ kota.	1. Portal e-Legislati pada 5 (lima) website DPRD 2. Screenshot portal legislasi	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (KEMENDESA PDTT)**

Nomor Komitmen : 5
 Aksi : Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa
 Penanggung Jawab : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 Instansi Terkait : 1. Kantor Staf Presiden
 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 CSO Mitra : 1. PATTIRO
 2. Wahana Visi Indonesia (WVI)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa	Tersedianya draft/rancangan Permendesa tentang Pendampingan Desa	B03	Kajian pendamping desa per provinsi	1. Surat Penyampaian Rancangan Target Komitmen RAN OGI than 2020 Nomor S-35/PR.03.01/01/2020 yang berisi penjelasan mengenai penurunan alokasi anggaran sehingga program tidal dapat dilaksanakan 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 18 Tahun 2019 tenting Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Data dukung sesuai dengan target capaian

			B06	Kajian pendamping desa per provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Rancangan Target Komitmen RAN OGI than 2020 Nomor S-35/PR.03.01/01/2020 yang berisi penjelasan mengenai penurunan alokasi anggaran sehingga program tidal dapat dilaksanakan 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 18 Tahun 2019 tenting Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa 	Data dukung sesuai dengan target capaian
2	Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif		B09	Konsultasi publik draft rancangan Permendesa tentang Pendampingan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa 2. Surat Penyampaian Rancangan Target Komitmen Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2020, Nomor S 35/PR.03.01/01/2020 kepada Bapak Tatang Muttaqin, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas. Isi surat menjelaskan penurunan alokasi anggaran yang mengakibatkan program komitmen tidak dapat dilaksanakan pada 2020 	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Penyusunan naskah akademik draft rancangan Permendesa tentang Pendampingan Desa	Surat Penyampaian Rancangan Target Komitmen Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) Tahun 2020, Nomor S-35/PR.03.01/01/2020 kepada Bapak Tatang Muttaqin, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas. Isi surat menjelaskan penurunan alokasi anggaran yang mengakibatkan program komitmen tidak dapat dilaksanakan pada 2020	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

Nomor Komitmen : 7
 Aksi : Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
 Penanggung Jawab : Komisi Pemilihan Umum
 Instansi Terkait : 1. Kantor Staf Presiden
 2. Badan Pengawas Pemilu RI
 3. Kementerian Dalam Negeri
 CSO Mitra : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target			Realisasi	Catatan
						(Data Dukung)	
1	Terciptanya transparansi data kepemiluan yang dapat diakses oleh masyarakat	UK1: Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara online di portal resmi KPU	UK1	B03	Tidak ada target		Tidak ada target
				B06	Tidak ada target		Tidak ada target
				B09	Tidak ada target		Tidak ada target
				B12	Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara online di portal resmi KPU		Tidak mengumpulkan data dukung dan pelaporan
		UK2: Terhubungnya data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan Satu Data	UK2	B03	Tidak ada target		Tidak ada target
				B06	Tidak ada target		Tidak ada target
				B09	Terhubungnya data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan Satu Data		Tidak mengumpulkan data dukung dan pelaporan
				B12	Terhubungnya data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan Satu Data		Tidak mengumpulkan data dukung dan pelaporan

CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES)

Nomor Komitmen : 8
 Aksi : Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
 Penanggung Jawab : Kementerian Kesehatan
 Instansi Terkait : Kementerian Dalam Negeri
 CSO Mitra : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Keterangan:
 Target tercapai
 Target tidak tercapai
 Target belum dikumpulkan
 Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah dan Puskesmas	UK1: Tersedianya informasi tentang identitas, tempat tidur, dan tenaga medis di Puskesmas	UK1	B03	Rapat koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait penggunaan peta dasar yang dimiliki oleh BIG	1. Surat laporan capaian Target B03/Triwulan I dan B06/Triwulan II RAN OGI Nomor KU.02.02/4/2139/2020 2. Notulensi Rapat Koordinasi Dengan Badan Informasi Geospasial Terkait Penggunaan Peta Dasar yang Dimiliki Badan Informasi Geospasial (BIG)	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B06	Pengembangan Aplikasi Iheff ke dalam Mhealth	1. Excel Sheet berisi update IHeFF 2. Laporan mengenai IHeff dan screenshot aplikasi	Data dukung sesuai dengan target capaian
					Pemutakhiran data puskesmas yang telah teregistrasi		
				B09	Ujicoba Iheff yang sudah masuk ke dalam Mhealth	1. Penyampaian laporan capaian 809/TW III Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia 2018-2020 nomor PR.01.03/I.1/11241/2020	Data dukung sesuai dengan target capaian
					Pemutakhiran data puskesmas terbaru		

					2. Laporan mengenai M-Health serta screenshot mengenai fitur Aplikasi M-Health		
			B12	Sosialisasi aplikasi IHeFF pada Hari Kesehatan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Capaian Target B12/Triwulan IV, RAN OGI tahun 2020 Nomor IR.03.01/4/4434/2020 2. Screenshot Aplikasi IHeFF beserta fitur-fiturnya 3. Sosialisasi IHeff di Sosial Media (screenshot) 4. Video Sosialisasi IHeFF (https://pusdatindoc.kemkes.go.id:5001/sharing/8uNFxwA4s) 5. Dokumentasi Sosialisasi IHeFF 6. Surat Penyampaian laporan capaian B12/TW IV Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia tahun 2020 Nomor PR.01.03/I.1/13643/2020 7. Surat Penyampaian laporan capaian B12/TW IV Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia tahun 2020 Nomor IR.03.01/4/4434/2020 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal, Kemenkes 	Data dukung sesuai dengan target capaian	
		UK2: Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM, dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui aplikasi RS Online	UK2	B03	Uji coba aplikasi RS Online yang terintegrasi dengan SIRANAP di UPT Vertikal	Juknis Siranap (Sistem Informasi Rawat Inap)	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B06	Tersedianya informasi ketersediaan jumlah tempat tidur di RS Rujukan Nasional dan Provinsi dalam aplikasi RS Online	Screenshot Dashboard RS rujukan https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/rujukan	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B09	Tersedianya informasi ketersediaan jumlah tempat tidur	1. Penyampaian laporan capaian 809/TW III Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government)	Data dukung sesuai dengan target capaian

					di RS Rujukan Nasional dan Provinsi dalam aplikasi RS Online	Indonesia 2018-2020 nomor PR.01.03/I.1/11241/2020 2. Laporan mengenai M-Health serta screenshot mengenai fitur Aplikasi M-Health yang juga berisi fitur ketersediaan tempat tidur di RS	
			B12		Tersedianya informasi ketersediaan jumlah tempat tidur di RS Rujukan Nasional dan Provinsi dalam aplikasi RS Online	1. Laporan Capaian Target B12/Triwulan IV, RAN OGI tahun 2020 Nomor IR.03.01/4/4434/2020 Kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal, Kemenkes 2. Surat Penyampaian laporan capaian B12/TW IV Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government) Indonesia tahun 2020 Nomor PR.01.03/I.1/13643/2020 Kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI dimana aplikasi RS Online yang sudah terintegrasi dengan aplikasi ketersediaan tempat tidur (SIRANAP) 3. Screenshot aplikasi IHeFF 4. Screenshot sosialisasi IHeFF di Sosial Media 5. Informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit rujukan nasional dan rujukan provinsi 14 desember 2020	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Nomor Komitmen : 10
 Aksi : Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N
 Penanggung Jawab : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Instansi Terkait : 1. Kantor Staf Presiden
 2. Ombudsman
 3. Kementerian Dalam Negeri
 CSO Mitra : 1. YAPPIKA-*Action Aid*
 2. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Keterangan:

 Target tercapai

 Target tidak tercapai

 Target belum dikumpulkan

 Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR-SP4N	UK1: Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target minimal 25%)	UK1	B03	 <p>Surat Menteri PAN RB untuk evaluasi pengelolaan LAPOR!-SP4N</p> <p>1. Surat Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) Tahun 2019, Nomor B/21/M.PP.00.04/2020</p> <p>2. Surat Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) Tahun 2019, Nomor B/20/M.PP.00.04/2020</p>	Data dukung sesuai dengan target capaian

					3. Data target RAN 2018-2020 KemenPAN RB B03 dan B06	
			B06	Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan laporan yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Rakor Evaluasi Laporan Prakerja 2. Berita Acara Rapat Evaluasi dan Koordinasi Terkait Prakerja 08052020 3. Surat Undangan Rakor Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Nomor B/112/PP.03/2020 4. Berita acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik PT PLN (PERSERO) dan PT KAI (PERSERO) 5. Berita acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik terkait Bantuan Sosial 6. Berita acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik POLRI 7. Surat Undangan Rapat Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR Nomor B/135/PP.03/2020 8. Surat Tindak Lanjut Pemantauan Pelayanan Publik Berdasarkan Platform Nasional 	Data dukung sesuai dengan target capaian

						<p>Aplikasi LAPOR! Tahun 2019 Nomor B/99/PP.03/2020</p> <p>9. Surat Tindak Lanjut Pemantauan Pelayanan Publik Berdasarkan Platform Nasional Aplikasi LAPOR! Tahun 2019 Nomor B/100/PP.03/2020</p> <p>10. Tindak Lanjut Monev SP4N-Lapor! 2019 Kementerian dan Lembaga</p> <p>11. Tindak Lanjut Monev SP4N-Lapor! 2019 Pemerintah Daerah</p> <p>12. Notula Pembahasan Lanjutan Draft Roadmap (peta jalan) SP4N 2020-2024 Tgl 23 April 2020</p> <p>13. Excell Sheet Data Target RAN 2018-2020</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

				B09	Rapat kerja dalam rangka koordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan laporan yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Petunjuk dan Penjelasan Pengisian Angket Nomor B/196/S.PP.03/2020 2. Undangan Rapat Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! NOMOR : 459/TU.01.06/2020 3. Undangan Launching dan Sosialisasi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 Nomor B/180/PP.03/2020 4. Undangan Rapat Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! Nomor B/198/PP.03/2020 kepada Sekretaris Jenderal Ombudsman RI dan Deputi II Kantor Staf Presiden 5. Undangan Rapat Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Nomor B/177/PP.03/2020 6. Sosialisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! untuk Kementerian dan Lembaga Nomor B/200/PP.03/2020 	Data dukung sesuai dengan target capaian
--	--	--	--	-----	--	--	--

						<p>7. Sosialisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! untuk Pemerintah Daerah Nomor B/201/PP.03/2020</p> <p>8. Permohonan Sebagai Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Review Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2020 Nomor B/184/PP.03/2020 ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p> <p>9. Undangan FGD Review Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2020 Nomor B/167/PP.03/2020</p> <p>10. Undangan Rapat Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Nomor B/165/PP.03/2020 ditujukan kepada Tim SP4N-LAPOR! Ombudsman RI</p> <p>11. Undangan Menghadiri Focus Group Discussion Penyampaikan Hasil Pengisian Angket Nomor B/215/PP.03/2020</p> <p>12. Undangan Review Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2020 Nomor B/167/PP.03/2020</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

				B12	Jumlah pengaduan melalui LAPOR!-SP4N yang telah ditindaklanjuti sebanyak 25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Provinsi Jambi 2. Laporan Hasil Kegiatan Review Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi Lampung Tahun 2020 3. Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Tindak Lanjut Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Provinsi Maluku 4. Notulensi FGD (Forum Group Discussion) evaluasi tindak lanjut pengelolaan sp4n-lapor! Provinsi maluku dan maluku utara 5. Laporan Hasil Kegiatan Review Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (Pontianak, 11 November 2020) 6. Undangan Evaluasi Lanjutan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Nomor B/240/M.PP.03/2020 7. Presentasi berjudul Closing Meeting Evaluasi Dokumen Kompetisi P4 tahun 2020 	Data dukung sesuai dengan target capaian
--	--	--	--	-----	--	---	--

						<p>8. Pemberitahuan Penyerahan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 dan Top Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020, Nomor B/366/PP.00.05/2020</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>10. Excell sheet yang berisi Detail Presentase capaian akhir Instansi (K/L)</p> <p>11. Excell sheet yang berisi penjelasan capaian B12</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)**

Nomor Komitmen : 11
 Aksi : Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Penanggung Jawab : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Instansi Terkait : 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 2. Kantor Staf Presiden
 3. Ombudsman RI
 CSO Mitra : Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan
					(Data Dukung)	
1	Tersedianya Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	B03	Penyusunan peraturan Sekjen tentang SOP tentang tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK	1. Screenshot Koordinasi Pengelolaan Portal Lapor! KLHK 2. Excell Sheet Koordinasi Pengelolaan Portal Lapor! KLHK 3. Surat Koordinasi Pengelolaan Portal Lapor! KLHK Nomor UN. B4/Datin/PTI/DTN.2/6/2020 4. SOP Penanganan Pengaduan Aplikasi LAPOR 5. Nota Dinas Nomor: ND.63/DATIN/PTI/DTN.2/6/2020 mangeraai Laporan Hasil Evaluasi	Tahapan hingga saat ini masih dalam proses penyusunan peraturan Sekjen tentang SOP tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK, sesuai data dukung terlampir

				Laporan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR! SP4N)		
			B06	Tidak ada target		
			B09	Tersedianya draft peraturan Sekjen tentang SOP tentang tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK	Draft SK Sekjen KLHK tentang pembentukan tim pengelola/kelompok kerja (POKJA) penanganan pengaduan dan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Data dukung sesuai dengan target capaian
			B12	Tersedianya peraturan Sekjen tentang SOP tentang tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK	Draft SK Sekjen KLHK tentang pembentukan tim pengelola/kelompok kerja (POKJA) penanganan pengaduan dan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	SK Sekjen masih dalam bentuk draft

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**

Nomor Komitmen : 12
 Aksi : Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 Penanggung Jawab : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Instansi Terkait : Komisi Pemberantasan Korupsi
 CSO Mitra : 1. Indonesian Corruption Watch (ICW)
 2. Transparency International Indonesia (TII)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	UK1: Workshop pengawasan pengadaan barang/jasa kepada organisasi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah	UK1	B03	Terlaksananya workshop pengawasan barang/jasa dengan kolaborasi bersama CSO untuk kelompok masyarakat sipil, baik di pusat dan/atau daerah	1. Presentasi berjudul Membongkar Modus Pinjam “Bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 04 Maret 2020 2. Presentasi berjudul Mengenal Metode Evaluasi 3. Presentasi berjudul Modus Penyimpangan dalam Pengadaan 4. Presentasi berjudul Kawal Pengadaan Bebas dari Korupsi Alur PBJP 5. Presentasi berjudul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menggunakan Opentender, 5 Maret 2020 6. Pengantar dan Panduan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa versi Masyarakat Sipil 7. Daftar Hadir peserta workshop	Data dukung sesuai dengan target capaian

					<p>8. KAK Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>9. Notulensi dan laporan perjalanan dinas kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 03 - 05 Maret 2020</p> <p>10. Susunan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 03 - 05 Maret 2020</p> <p>11. Nota Dinas Nomor 333/D.4.3/02/2020 mengenai Undangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujukan Kepala Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana</p> <p>12. Surat Undangan Permohonan Narasumber yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p> <p>13. Nota Dinas Nomor 334/D.4.3/02/2020 Undangan Permohonan Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>14. Surat undangan sebagai peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditujakn kepada Organisasi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Pemerhati Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>		
				B06	<i>Tidak ada target</i>		
				B09	<i>Tidak ada target</i>		
				B12	<i>Tidak ada target</i>		

2	Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR-SP4N	UK2: Pemanfaatan SPSE dalam seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah.	UK2	B03	Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dalam PBJ di Lingkup Kementerian/Lembaga	Pelaporan Pemanfaatan SPSE OGI 2020 beserta Sumber Data	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B06	Pemanfaatan SPSE dalam persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Kementerian/Lembaga	Pelaporan Pemanfaatan SPSE OGI 2020 beserta Sumber Data	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B09	Pemanfaatan fitur e-kontrak SPSE dalam pelaksanaan kontrak PBJ di lingkup Kementerian/Lembaga	Pelaporan Pemanfaatan SPSE OGI 2020 beserta Sumber Data	Data dukung sesuai dengan target capaian
				B12	Pemanfaatan fitur e-kontrak dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan B/J di lingkup Kementerian/Lembaga	Excell Sheet berisi Pemanfaatan fitur e-kontrak dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan B/J di Lingkup Kementerian/Lembaga	Data dukung sesuai dengan target capaian

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
Komisi Informasi Pusat (KIP)**

Nomor Komitmen : 12
 Aksi : Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 Penanggung Jawab : Komisi Informasi Pusat (KIP)
 Instansi Terkait : Komisi Pemberantasan Korupsi
 CSO Mitra : 1. Indonesian Corruption Watch (ICW)
 2. Transparency International Indonesia (TII)

Keterangan:

 Target tercapai

 Target tidak tercapai

 Target belum dikumpulkan

 Tidak ada target

No	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	UK1: Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.	UK1	B03	Pelaksanaan konsultasi publik		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	Pelaksanaan konsultasi publik		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	<i>Tidak ada target</i>		
				B12	<i>Tidak ada target</i>		
		UK2: Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi	UK2	B03	<i>Tidak ada target</i>		

		Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP.		B06	Tersedianya draft Perki terkait DIP untuk Pengadaan Barang/Jasa		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Tersedianya draft Perki SLIP terkait DIP untuk Pengadaan Barang/ Jasa Pemanfaatan fitur e-kontrak SPSE dalam pelaksanaan kontrak PBJ di lingkup Kementerian/Lembaga		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B12	<i>Tidak ada target</i>		

**CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)**

Nomor Komitmen : 13
 Aksi : Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia
 Penanggung Jawab : Komisi Informasi Pusat
 Instansi Terkait : 1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
 4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
 5. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
 CSO Mitra :

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik.	UK1: Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi)	UK1	B03	Tersedianya permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	Tersedianya permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Tersedianya permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B12	Tersedianya permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung

2	Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR-SP4N	UK2: Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan	UK2	B03	Tidak ada target		
				B06	Penilaian terhadap KI Provinsi untuk pemeringkatan keterbukaan lembaga publik		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Penilaian terhadap KI Provinsi untuk pemeringkatan keterbukaan lembaga publik		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B12	Penilaian terhadap KI Provinsi untuk pemeringkatan keterbukaan lembaga publik		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung

CAPAIAN TARGET TRIWULAN I (B03), II (B09), III (B09), dan IV (B12)
RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2019
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (KEMENKUM HAM)

Nomor Komitmen : 14
 Aksi : Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum
 Penanggung Jawab : Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM
 Instansi Terkait : Kementearin Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 CSO Mitra : 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
 2. Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Media Link)

Keterangan:

- Target tercapai
- Target tidak tercapai
- Target belum dikumpulkan
- Tidak ada target

No.	Sasaran Akhir	Ukuran Keberhasilan	Target		Realisasi	Catatan	
					(Data Dukung)		
1	Tersedianya kerangka regulasi dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di daerah	UK1: Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.	UK1	B03	Penyusunan materi sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan dan Penganggaran Bantuan Hukum di Daerah pada tingkat Provinsi		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	Sosialisasi atau Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk Perluasan Pemberian Bantuan Hukum melalui pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di tingkat Provinsi		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Asistensi Kanwil Kumham kepada Pemerintah Daerah untuk pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di tingkat Provinsi		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung

				B12	Tersedianya 21 Perda dan/atau Ranperda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi	Tersedianya 21 Perda dan/atau Ranperda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi	
		UK2: Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (penyuluhan hukum, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 10.000 orang.	UK2	B03	1. Penyusunan materi sosialisasi layanan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat rentan		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	2. Sosialisasi kepada OBH tentang layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat rentan		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Sosialisasi kepada Kanwil Kumham tentang layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat rentan		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B12	Sosialisasi layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat rentan		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
		UK 3: Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum (25% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas)	UK3	B03	Penyusunan materi sosialisasi dan implementasi standar layanan bantuan hukum guna tercapainya Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKPBH)		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B06	Sosialisasi standar layanan bantuan hukum kepada Kanwil Kumham		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung
				B09	Sosialisasi standar layanan bantuan hukum oleh Kanwil kepada PBH		Tidak mengumpulkan pelaporan dan data dukung

				B12	<p>25% PBH membuat SPM (Standar Pelayanan Minimum) sesuai dengan Standar Layanan (Starla)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pelayanan bantuan hukum (penyuluhan hukum, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 10.000 orang 2. Starla dan IKM 	<p>25% PBH membuat SPM (Standar Pelayanan Minimum) sesuai dengan Standar Layanan (Starla) Capaian terhadap Komitmen tidak dapat dipenuhi, karena Rancangan Permenkumham mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum masih dalam proses Penetapan hingga akhir tahun 2020.</p>
					<p>25% peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum</p>		<p>25% peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum</p>